

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Ismadewi et al., (2017:2) Usaha /Mikro, Kecil dan Menengah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM, karena UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2019 mencapai 64 juta. Dari jumlah UMKM yang ada, 99.8% merupakan UMKM yang mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berasal dari usaha kecil seperti koperasi UMKM, besar kontribusi yang diberikan yaitu 56% (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia,2019).

Istilah lain dari UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Di proses pengembangannya, salah satu kesulitan yang dialami UMKM yaitu modal usaha sebagai masalah pendanaannya. Jika tidak melakukan pengembangan usaha dan melakukan inovasi terbaru, maka besar kemungkinan para UMKM tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya. Jika ingin mengembangkan usaha tersebut maka diperlukan tambahan yang cukup besar.

Untuk menjalankan usaha tersebut kebanyakan UMKM menggunakan dana yang berasal dari modal pribadi, dan tidak ada pemisahan antara uang usaha dengan uang pribadi. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha untuk menjadi maju dan lebih baik membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha. Oleh sebab itu, tidak hanya dana pribadi saja yang dibutuhkan tetapi dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga seperti bank, KUR atau sejenis lainnya. Namun, fenomena yang ada pada saat ini banyak UMKM yang hanya menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usaha mereka.

Di Indonesia sudah ditetapkan peraturan yang mewajibkan usaha kecil melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Meski telah jelas adanya tentang peraturan, pada kenyataannya pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar masih banyak pelaku UMKM yang tidak melakukannya. Melihat sangat pentingnya penerapan standar akuntansi untuk UMKM maka dari itu IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun standar akuntansi sesuai dengan karakteristik UMKM. Di Indonesia Standar Akuntansi yang berlaku adalah SAK yang berbasis IFRS, SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah), SAK Syariah dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Standard akuntansi keuangan untuk bidang usaha yang dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas public adalah SAK-EMKM Purba, (2019:2). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang terbaru dikeluarkan oleh IAI pada 24 Oktober 2016 dan diberlakukan efektif per 1 Januari 2018. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha Hetika & Nurul Mahmudah, (2017:2).

Pada data akhir tahun 2019 di Kota Batam terdapat 460 jenis UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang terdiri dari beberapa jenis usaha seperti kerajinan, makanan/minuman, pertanian, perdagangan dan jasa. Di Kota Batam masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pembukuan sesuai standar yang berlaku. Beberapa hal yang menyebabkan adalah karena adanya persepsi pelaku UMKM bahwa pembukuan tidak penting untuk usahanya, kurang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi serta tingkat pendidikan yang rendah. Pelaku UMKM tidak menerapkan pembukuannya sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, tetapi pelaku UMKM hanya melakukan pembukuan berupa kas masuk dan kas keluar dalam transaksi usahanya. Dengan adanya pelatihan pencatatan transaksi sesuai akuntansi dan pemahaman tentang SAK EMKM diharapkan pelaku UMKM Kota Batam agar kedepannya bisa membuat laporan dengan baik, agar mempermudah UMKM jika ingin melakukan pinjaman ke Bank untuk modal dalam mengembangkan usahanya.

Agar dapat mengajukan peminjaman ke Bank dengan mudah, maka pelaku UMKM harus membuat laporan akuntansi. Menurut Andriani et al., (2014:2), Padahal dengan adanya laporan keuangan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha kecil. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan judulnya sebagai berikut “**ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM**”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perlunya menerapkan Standard Akuntansi Keuanga Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dalam proses pembuatan laporan keuangan.
2. Penerapan standar akuntansi menurut Standard Akuntansi Keuanga Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada UMKM di Kota Batam
3. Pelaku UMKM mengalami beberapa kendala dalam menerapkan Standard Akuntansi Keuanga Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) saat penyusunan laporan keuangannya.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat tersebut perlu untuk dibatasi daerah cakupan penelitiannya. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitiannya hanya yang berkaitan dengan:

1. Daerah penelitian adalah di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
2. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya.
3. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh UMKM tersebut.
4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah pada laporan keuangan UMKM.

1.4 Perumusan Masalah

Salah satu penyumbang kontribusi bagi perekonomian yang ada di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, masyarakat di Indonesia agar tetap bisa bertahan dari krisis ekonomi yang melanda saat ini adalah dengan adanya UMKM tersebut. UMKM mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi kondisi keuangan yang ada di Indonesia, maka sudah seharusnya pelaku UMKM membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi agar dapat memaksimalkan laba yang didapat. Standar akuntansi yang mengatur tentang UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat memaksimalkan laba yang diinginkan jika menggunakan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Selain itu, peran pemerintah untuk memperkenalkan SAK EMKM kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Tetapi sejauh ini pemerintah di Kota Batam terlihat kurang mensosialisasikan standar akuntansi tersebut, sehingga untuk penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kota Batam menjadi isu yang menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penulisan skripsi ini peneliti akan membuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembukuan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sudah merapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
2. Apakah kendala dalam melakukan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
3. Bagimanakah proses pembukuan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan maka penulis ingin mengungkapkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Agar mengetahui bagaimana proses pembukuan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melakukan pembukuan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
3. Untuk mengetahui apakah pembukuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada pelaku UMKM di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian pada bidang akuntansi, dan penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan praktek penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) untuk para pelaku UMKM terutama UMKM yang ada di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk pembelajaran bagi peneliti agar terjun langsung ke lapangan dan agar mengetahui perbedaan diantara teori yang sudah dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan agar menjadi salah satu referensi dalam kajian materi perkuliahan terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan pelaku UMKM.

b. Bagi Pihak UMKM

Penelitian agar diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada pelaku UMKM sehingga dapat mengetahui tentang pentingnya pembuatan laporan keuangan dan pengaplikasiannya pada usaha mereka agar kedepannya dapat mengembangkan bisnis tersebut lebih luas.